PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Komplek Perkantoran Jln. Drs. H. Soejoed No. 05A, Telepon (0265) 771032 Fax (0265) 7746213,
C I A M I S

Ciamis, 22 Februari 2024

Nomor : 000.7.5/232/BPKD-I/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

Yth. Bapak Bupati Ciamis

di

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kInerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Berkenaan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dan Renstra Tahun 2023 (sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebesar Rp. 540.405.121.151;
3. Prestasi dan penghargaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2023 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih.

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

ASEP DEDI HERDIANA., SE
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19650912 199301 1 001

Tembusan:
Yth. 1. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
2. Bapak Sekretaris Daerah;
3. Bapak Inspektur.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023

DRS. H. SOEJOED
NO. 14 A TELP.
(0265) 771032
CIAMIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciams dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*) di Kabupaten Ciamis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 ini tentu masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagamana mestinya.

Ciamis, Februari 2024

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

ASEP DEDI HERDIANA, SE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta pembandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan

kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,94%, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Ket
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	89,25	89,60	100,39	Melebihi Target
		Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	BB	BB	100,00	Tercapai
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	3	3	100,00	Tercapai
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	780	826	105,90	Melebihi Target
3	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100,00	Tercapai
		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100,00	Tercapai
4	Meningkatkan Pengelolaaân Aset (Barang Milik Daerah)	Persentase Barang Aset (Barang Milik Daerah) Yang Terkelola	100%	114,26%	114,26%	Melebihi Target
	Rata-rata capaian				**102,94**	**Melebihi Target**

Secara umum target kinerja dapat tercapai, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan-hambatan antara lain :

1. Belum optimalnya produk pelayanan, kurangnya perilaku pelayanan oleh petugas serta kelengkapan dokumen persyaratan.

2. Masih kurangnya kesadaran dan kemauan/keinginan untuk menerapkan akuntabilitas.
3. Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan,
4. Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah

Atas dasar hambatan-hambatan tersebut, rencana aksi guna optimalisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dimasa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan produk pelayanan, memperbaiki perilaku pelayanan petugas serta melengkapi dokumen-dokumen persyaratan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas
3. Meningkatkan pemahaman SDM pengelola kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sosialisasi dan pendampingan.
4. Optimalisasi kegiatan koordinasi, rekonsiliasi secara terus menerus baik dari Kepala SKPD, pengurus barang sampai operator tiap SKPD agar penyusunan laporan Barang Milik Daerah dapat diselesaikan tepat waktu.

Ciamis, Februari 2024

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASEP DEDI HERDIANA, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GRAFIK ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
C. Isu Strategis 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA **12**
A. Tujuan dan Sasaran BPKD 12
B. Perjanjian Kinerja 12
C. Strategi, Program dan Kegiatan dan Subkegiatan 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **17**
A. Capaian Kinerja Organisasi 17
B. Akuntabilitas Keuangan 52
C. Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 56
BAB IV PENUTUP **57**
LAMPIRAN **59**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	6
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 1.4	Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselonering.....	9
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024..	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.....	13
Tabel 2.3	Strategi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan TA. 2023.....	14
Tabel 2.4	Anggaran Program dan Penanggung Jawab.....	16
Tabel 3.1	Data Capaian Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD 2023.....	20
Tabel 3.3	Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021-2023.....	20
Tabel 3.4	Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target RPJMD.....	21
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	21
Tabel 3.6	Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	22
Tabel 3.7	Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah BPKD.....	24
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi AKIP BPKD Tahun 2023.....	25
Tabel 3.9	Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Tahun 2021-2023.....	25
Tabel 3.10	Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Tahun 2023.....	25
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jabar TA.2023.....	26
Tabel 3.12	Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD.....	27
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Hasil Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKD.....	29
Tabel 3.14	Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Th. 2021-2023.....	29
Tabel 3.15	Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD Tahun 2023 dengan Target RPJMD.....	30
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD dengan Standar Nasional.....	30
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Level Maturitas Internal Pemerintah Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....	31

Tabel 3.18 Data Anggaran Sasaran Strategis Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD..... 32
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD 2023..... 34
Tabel 3.20 Rincian Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023..... 34
Tabel 3.21 Data Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2021-2023..... 35
Tabel 3.22 Perbandingan Data Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023 dengan Target RPJMD..... 35
Tabel 3.23 Rekap Opini hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK-RI di Jawa Barat Tahun 2022..... 36
Tabel 3.24 Data Anggaran Sasaran Strategis Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD..... 37
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD Tahun 2023..... 39
Tabel 3.26 Data Capaian Kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD Tahun 2021-2023..... 40
Tabel 3.27 Perbandingan Data Capaian Kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD Tahun 2023 dengan Target RPJMD..... 40
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023..... 40
Tabel 3.29 Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian APBD..... 41
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu Tahun 2022..... 44
Tabel 3.31 Data Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat Waktu Tahun 2021-2023..... 44
Tabel 3.32 Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar,sesuai SAP dan tepat waktu Tahun 2023 dengan Target RPJMD..... 44
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tepat Waktu Penyampaian LKPD dengan Provinsi Jawa Barat Th.2022..... 45
Tabel 3.34 Data Anggaran Sasaran Strategis kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu..... 45
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola Tahun 2023..... 49
Tabel 3.36 Data Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola Tahun 2021-2023..... 49
Tabel 3.37 Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola Tahun 2023 dengan Target RPJMD..... 50
Tabel 3.38 Data Anggaran Sasaran Strategis Persentase Aset Daerah Yang Terkelola..... 50

Tabel 3.39 Data Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023..... 52
Tabel 3.40 Daftar Prestasi Tahun 2023..... 56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin..... 5
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat..... 7
Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 8
Grafik 1.4 Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering..... 9
Grafik 3.1 Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Standar Provinsi Jawa Barat tahun 2023..... 26

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada BPKD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP BPKD

Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP BPKD ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan BPKD Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa BPKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Selanjutnya pada Ayat (2) menguraikan fungsi BPKD Kabupaten Ciamis:

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi BPKD :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Penyusunan, Perencanaan Anggaran Daerah;
    2. Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
    2. Sub Bidang Perbendaharaan dan Dana Perimbangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
    2. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
    2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 BPKD Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 100 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 48 Orang, PPPK sebanyak 3 orang, Non PNS sebanyak 49 Orang, yang secara keseluruhan terdiri dari 60 Orang Laki-laki atau 60% dan 40 Orang Perempuan 40%. Dari jumlah pegawai sebanyak 100 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS				
1	Kepala BPKD	1		1
2	Sekretariat	5	9	14
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	5	3	8
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	1	6	7
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	2	5	7
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	3	11
JUMLAH PNS		**22**	**26**	**48**
PPPK				
1	**PPPK**	**2**	**1**	**3**
NON PNS				
1	Jasa Kebersihan	8		8
2	Administrasi	17	13	30
3	Keamanan	6		6
4	Sopir	5		5
JUMLAH NON PNS		**36**	**13**	**49**
JUMLAH SELURUH PEGAWAI		**60**	**40**	**100**

Grafik 1. 1

Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin

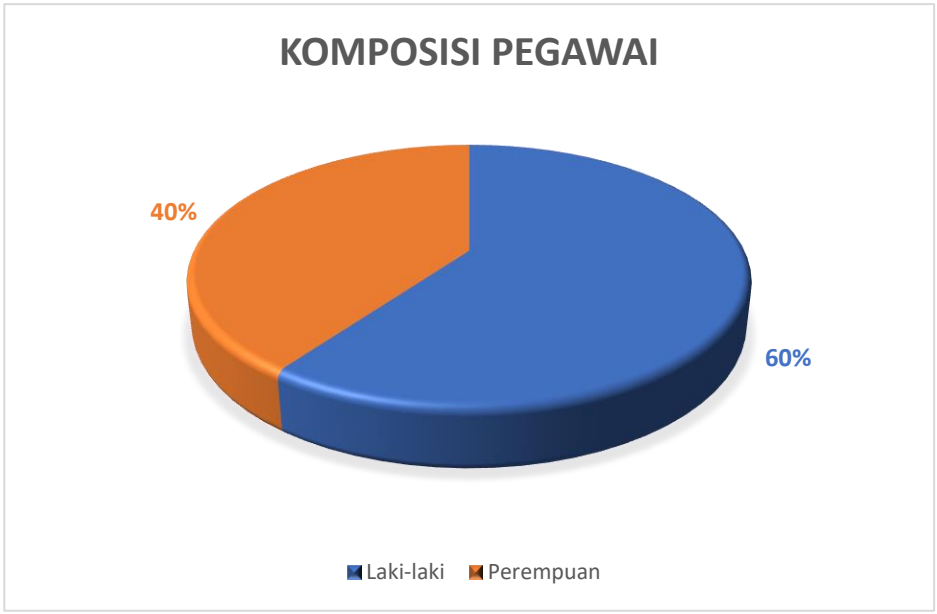

Tabel 1. 2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

NO	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																			
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	Kepala BPKD	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	14	2	-	-	-	-	2	2	6	2	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	8	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	7	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	7	1	-	-	-	-	1	2	2	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	9	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
Jumlah Per Golongan		48	5	0	1	-	-	6	10	12	2	15	39	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-

Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai PNS BPKD Kabupaten Ciamis per Januari 2024 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 39 orang atau 81%. kemudian disusul oleh golongan IV sebanyak 6 orang atau 13%, golongan II sebanyak 3 orang atau 6%.

Grafik 1. 2

Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

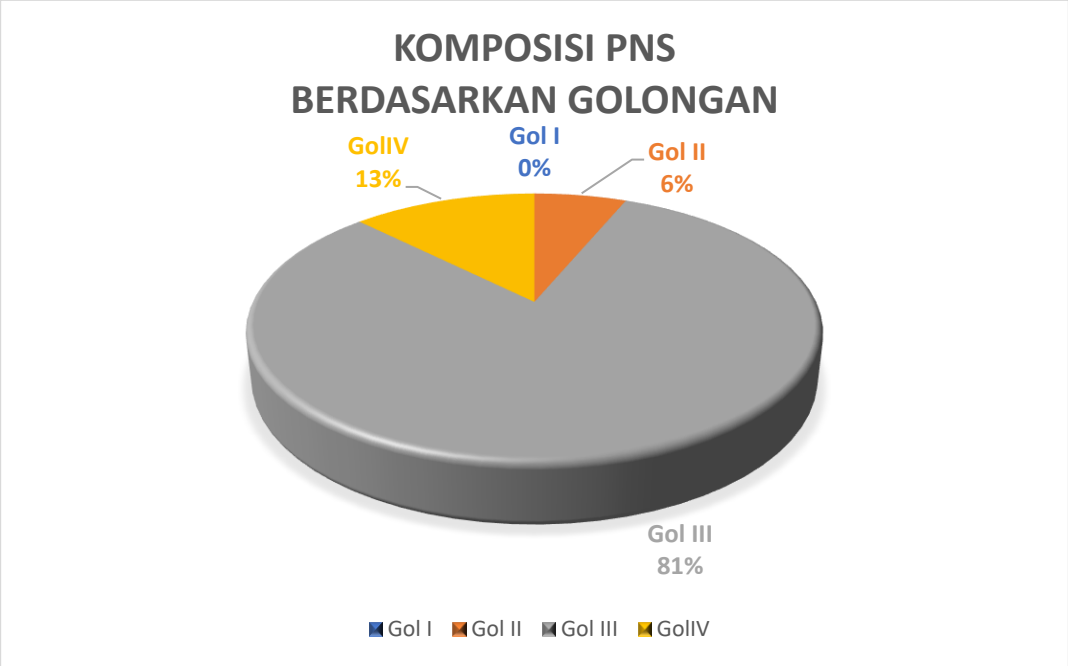

Tabel 1. 3
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS										
1	Kepala BPKD	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	3	7	-	-	4	-		14
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	2	4	-	-	2	-	-	8
4	Bidang Akuntansi dan Palaporan Keuangan Daerah	-	1	7	-	-	-	-	-	8

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
5	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	-	1	7	-	-	-	-	-	8
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1	9	-	-	2	-	-	12
Jumlah PNS dan PPPK			**8**	**35**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**51**
NON PNS										
1	Jasa Kebersihan	-	-	-	-	-	8	-	-	8
2	Administrasi	-	2	22	-	2	4	-	-	30
3	Keamanan	-	-	-	-	-	5	-	1	6
4	Sopir	-	-	1	-	-	4	-	-	5
	Jumlah Non PNS	**-**	**2**	**23**	**-**	**2**	**21**	**-**	**1**	**49**

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai PNS, PPPK dan Non PNS BPKD Kabupaten Ciamis per Januari 2024 berdasarkan Pendidikan S2 sebanyak 10 orang atau 10%, S1 sebanyak 58 orang atau 58%, D3 sebanyak 2 Org atau 2%, SLTA sebanyak 29 orang atau 29%, SD sebanyak 1 orang atau 1%.

Grafik 1. 3

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

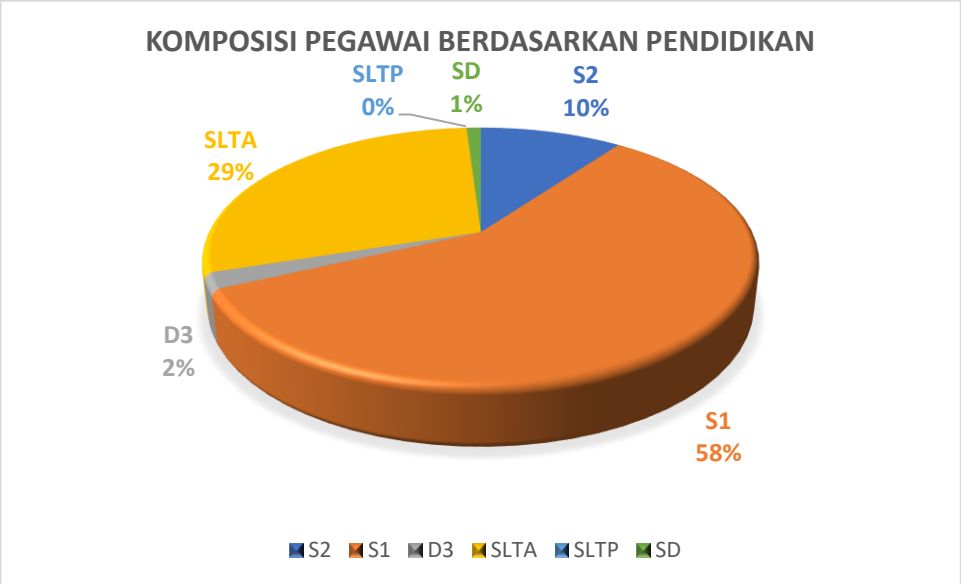

Tabel 1. 4
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	3	2	5
3.	Eselon IV	5	4	9
4.	Jabatan Fungsional	1	1	2
5.	Jabatan Pelaksana	15	19	34
	Jumlah			51

Grafik 1. 4
Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional

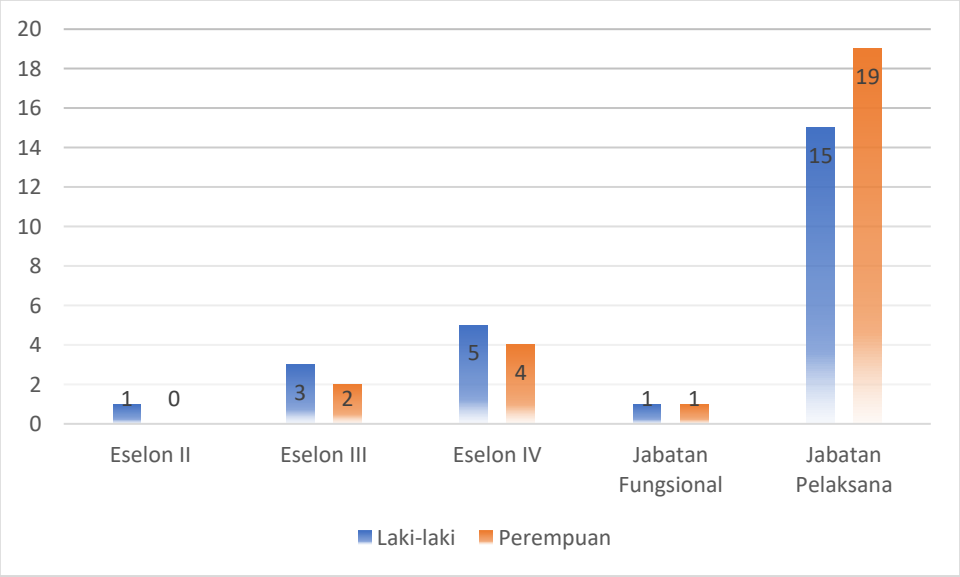

C. Isu Strategis

Dengan memperhatikan situasi lingkungan strategi nasional, daerah, serta internal, terdapat 4 (empat) isu strategis pada penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman SDM pengelola kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sosialisasi dan pendampingan.
2. Optimalisasi kegiatan koordinasi, rekonsiliasi secara terus menerus baik dari Kepala SKPD, pengurus barang sampai operator tiap SKPD agar penyusunan laporan Barang Milik Daerah dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional serta memberikan pendampingan kepada SKPD baik pendampingan adminsitrasi maupun pendampingan lapangan.
4. Penggunaan aplikasi pendamping SIPD dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah

Penerapan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan BPKD Kabupaten Ciamis menjadi kenyataan dengan dialihkannya sebagian pejabat struktural eselon IV menjadi Fungsional pada Bulan Desember 2021 lalu. Dengan kebijakan tersebut, unit kerja eselon IV menjadi unit yang paling terdampak proses penyederhanaan birokrasi ini. Unit kerja tersebut berperan menjadi ujung tombak keahlian pada tingkat operasional, yang dengan proses penyederhanaan diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelaksanaan tugas terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Unit eselon IV yang masih tersisa pada unit kerja adalah yang bersifat manajerial umum yaitu yang menangani ketatausahaan, mengingat rumpun tugasnya yang heterogen. BPKD Kabupaten Ciamis menagalami perubahan sangat signifikan dari perubahan birokrasi ini. Sampai dengan Kondisi sekarang yaitu tahun 2023, dari 11 (sebelas) Jabatan terdapat 2 (dua) jabatan eselon IV yang disederhanakan.

Struktur organisasi BPKD yang semula dominan struktural menjadi fungsional. Untuk beralih ke arah sistem birokrasi yang baru, perlu dibangun kebijakan tata hubungan kerja baru, serta perubahan *mind set*, *culture set* dan *skill set* aparatur. Hingga beberapa tahun mendatang, unit kerja dan aparatur masih memerlukan proses adaptasi agar perubahan ini berjalan efektif dan menghasilkan dampak bagi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyederhanaan birokrasi menjadi langkah awal untuk mewujudkan organisasi BPKD Kabupaten Ciamis yang *agile*, lebih efektif dan lebih ramping

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pelayanan publik yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagian penyelenggaraan pelayanan publik dibatasi pelaksanaannya, seperti pemberian layanan langsung, dan penerimaan kunjungan. Modernisasi sarana dan prasarana perkantoran di Perangkat Daerah juga perlu diprioritaskan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik mendatang. Sebagian besar sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah kurang representatif dan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan publik dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil survei, kecepatan pelayanan menjadi persoalan utama yang dikeluhkan publik. Sementara dari sisi aparatur, selain kualitas sarana/prasarana, kualitas jaringan telekomunikasi masih menjadi persoalan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mendukung pola kerja baru aparatur.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran BPKD

Secara umum, peran BPKD Kabupaten Ciamis sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Secara spesifik, peran BPKD Kabupaten Ciamis terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu Misi Ke-5 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".

Dalam pencapaian misi RPJMD, BPKD Kabupaten Ciamis mendukung Misi Ke 5 dengan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2019 – 2024

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	**Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**	Indeks Reformasi Birokrasi	**Nilai**	**C**	**B**	**B**	**BB**	**BB**
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Opini BPK (TPB16)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut

dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1. Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) BPKD	Persentase	89,25
		2. Hasil Evaluasi AKIP BPKD	Predikat	BB
		3. Level Maturitas SPIP BPKD	Nilai	3
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Kualitas Pelaporan keuangan BPKD	Angka	780
3	Meningkatkan kualitas penganggaran dan pelaporan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Persentase	100%
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Presentase	100%
4	Meningkatkan pengelolaan aset daerah (BMD)	Presentase aset daerah yang terkelola	Presentase	100%

C. Strategi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program, kegiatan dan subkegiatan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Strategi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Penyusunan Standar Harga
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
			Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan
			Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp.571.784.925.379,- yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab

	Program/Kegiatan	Anggaran	Penangggung Jawab
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.105.233.961**	Sekretariat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.842.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.440.567.961	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	385.808.250	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	728.564.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	616.205.750	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.541.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.285.704.000	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**539.329.116.922**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.234.564.000	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	975.504.500	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.467.377.000	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	535.651.671.422	PPKD
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**16.200.574.496**	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah	**571.784.925.379**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pencapaian misi RPJMD, BPKD Kabupaten Ciamis mendukung Misi Ke 5 RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dengan sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas dan Indikator Sasaran Opini BPK-RI.

Kabupaten Ciamis dari tahun 2013 - 2022 mendapatkan Opini BPK-RI yaitu dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut, yang juga berarti realisasi Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama Tahun 2019 – 2024 adalah mendapatkan Predikat WTP juga secara berturut-turut seperti dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	2019	2020	2021	2022
Opini BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Data capaian kinerja BPKD Kabupaten Ciamis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Data Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Persentase	89,25	89,60	100,39
		Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	Predikat	BB	BB	100,00
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level	3	3	100,00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	Nilai	780	826	105,90
3	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Persen	100%	100%	100,00
		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100%	100%	100,00
4	Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah (BMD)	Persentase Aset Daerah yang terkelola	Persen	100%	114,26%	114,26
Rata-rata Capaian						**102,94**

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competency*-nya. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokusnya diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke-5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 3 indikator yaitu

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD;
b. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD; dan
c. Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

a. Persyaratan Pelayanan;
b. Prosedur Pelayanan;
c. Waktu Pelayanan;
d. Biaya/Tarif ;
e. Produk Pelayanan;
f. Kompetensi Pelaksana;
g. Perilaku Pelaksana;
h. Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan i. Sarana dan Prasarana.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan progam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dimana sasarannya yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Persentase	89,25	89,60	100,39

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 89,25% dan dapat direalisasikan sebesar 89,73% sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100,50% melebihi target yang ditetapkan.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu produk pelayanan, perilaku petugas serta persyaratan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,62 biaya/tarif 3,53 serta pungutan tidak resmi mendapatkan nilai 3,50.

Tabel 3. 3
Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Persen	88.75	93.5	105.35	89	93.29	104.82	89,25	89,73	100,54

Pelaksanaan pelayanan publik di BPKD Kabupaten Ciamis mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89,73. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa IKM pada tahun 2023 (100,54%) mengalami penurunan realisasi sebesar 3,82% dibandingkan dengan tahun 2022(104,82%) dan menurun sebesar 4,03% dibandingkan realisasi tahun 2021(105,35%).

Tabel 3. 4
Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Nilai	89,25	89,73	100,54

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100,54%. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan masih sesuai dengan rencana.

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi Tahun 2023**	**Realisasi Provinsi Tahun 2023**	**Capaian %**
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	89,25%	89,73%	91.61%	97,94%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Adapun data capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (89,73%) diketahui berada di bawah capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Barat (91,61%).

Tabel 3. 6
Data Anggaran Sasaran Strategis
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**5.126.015.350**	**5.042.736.188**	**83.279.162**	**98,38**	**1,62**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**728.564.100**	**716.348.328**	**12.215.772**	**98.32**	**1.68**
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.088.600	89.087.885	715	100.00	0.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.346.500	265.344.943	1.557	100.00	0.00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.845.000	94.767.500	77.500	99.92	0.08
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.198.000	128.755.000	9.443.000	93.17	6.83
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141.086.000	138.393.000	2.693.000	98.09	1.91
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.495.541.500**	**2.469.684.536**	**25.856.964**	**98.96**	**1.04**
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.511.500	366.654.536	25.856.964	93.41	6.59
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.103.030.000	2.103.030.000	-	100.00	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**616.205.750**	**598.658.845**	**17.546.905**	**97.15**	**2.85**
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.300.000	23.300.000	-	100.00	-
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.555.000	111.688.845	8.866.155	92.65	7.35
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.350.750	463.670.000	8.680.750	98.16	1.84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.285.704.000**	**1.258.044.479**	**27.659.521**	**97.85**	**2.15**
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.000.000	368.420.279	4.579.721	98.77	1.23

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	12.167.700	16.332.300	42.69	57.31
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480.450.000	474.293.500	6.156.500	98.72	1.28
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.754.000	403.163.000	591.000	99.85	0.15

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.5.042.736.188,- atau 98,38% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.5.126.015.350,- dengan capaian output kinerja sebesar 100,54%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

   Belum optimalnya produk pelayanan, kurangnya Perilaku pelayanan oleh Petugas serta kelengkapan dokumen Persyaratan.

B. Faktor Pendukung

   Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi pendukung serta dukungan pimpinan.

C. Rencana Aksi

   Mengoptimalkan Produk Pelayanan, memperbaiki perilaku pelayanan Petugas serta melengkapi dokumen-dokumen persyaratan.

b. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD

Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja, yang meliputi 4 Komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja, dan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Kabupaten Ciamis adalah Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Capaian kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	Predikat	BB	BB	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai BB dan dapat direalisasikan sebesar BB sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Secara rinci hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi AKIP BPKD Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja, dan	15	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,26
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		**70,00**
			BB

Tabel 3. 9
Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	Predikat	BB	BB	100	BB	BB	100	BB	BB	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD pada tahun 2023 (100%) sama dibandingkan dengan tahun 2022 dan juga sama dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.10
Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Mutu	BB	BB	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD terealisasi sebesar 100%. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Grafik 3. 1

Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Standar Provinsi Jawa Barat tahun 2023

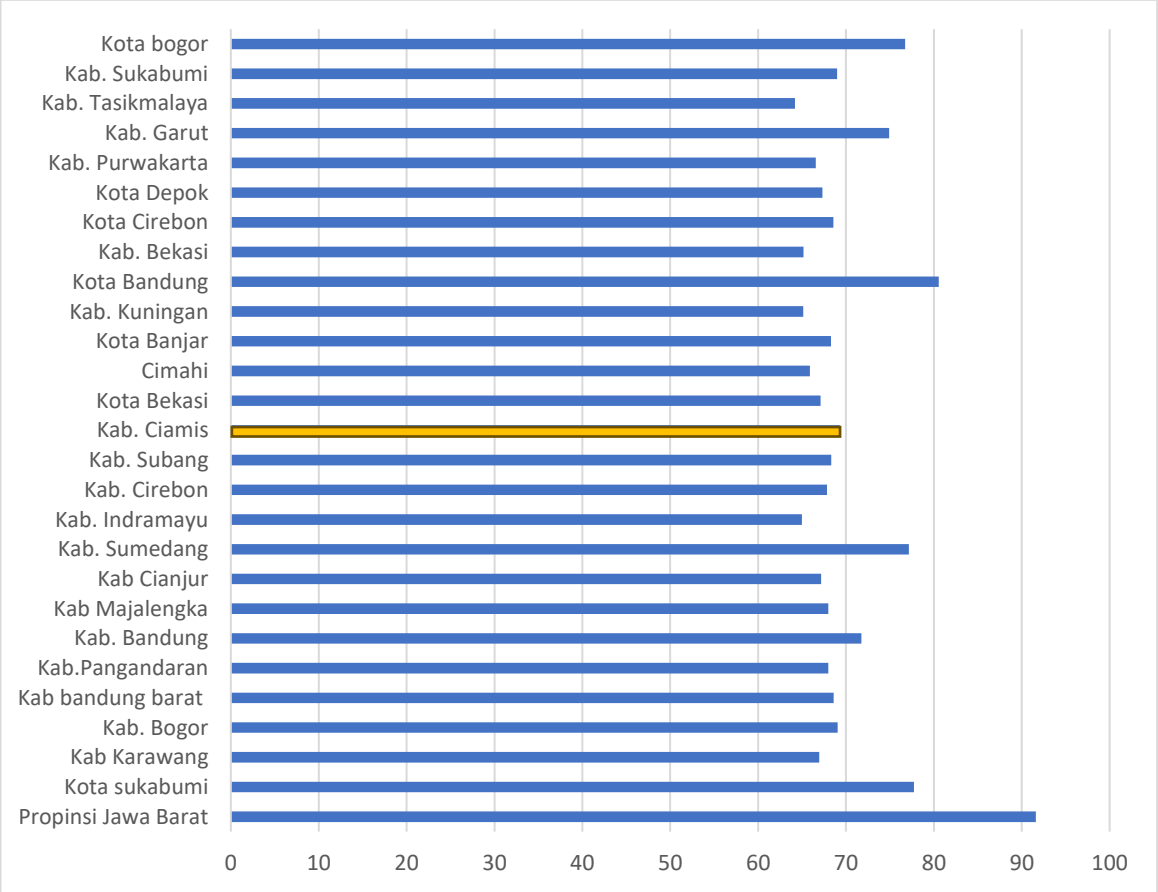

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Capaian %
1	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerinth (AKIP)	Persen	70,00%	70,00%	91,61%	76,41%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dengan indikator Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerinth (AKIP) dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Adapun data capaian kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (70%) diketahui berada dibawah capaian Presentasi X Provinsi Jawa Barat (91,61%).

Tabel 3.12
Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**422.428.250**	**419.782.750**	**2.645.500**	**99.37**	**0.63**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**36.620.000**	**35.550.000**	**1.070.000**	**97.08**	**2.92**
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	-	100.00	-
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.620.000	28.550.000	1.070.000	96.39	3.61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**385.808.250**	**384.232.750**	**1.575.500**	**99.59**	**0.41**
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.250.500	30.250.000	500	100.00	0.00
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	355.557.750	353.982.750	1.575.000	99.56	0.44

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.419.782.750,- atau 99,37% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.422.428.250,- dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan

publik perangkat daerah dengan indikator Kinerja Strategis Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

   Masih kurangnya kesadaran dan kemauan/keinginan untuk menerapkan akuntabilitas.

B. Faktor Pendukung

   Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi mendukung serta dukungan Pimpinan.

C. Rencana Aksi

   Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas

c. Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD.

Penilaian Mandiri SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terintegrasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu entitas pemerintah.

Proses penilaian mandiri SPIP terintegrasi melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

1. Penetapan Ruang Lingkup
2. Identifikasi Risiko.
3. Evaluasi Pengendalian Intern
4. Penilaian Kinerja
5. Pelaporan Hasil

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan peningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD adalah dengan progam Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Capaian kinerja Hasil Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Hasil Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD.	Level	3	3	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai level 3 dan dapat direalisasikan level 3 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.14
Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD pada tahun 2023 (100%) sama dibandingkan dengan tahun 2022 dan juga sama dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 100%.

Tabel 3.15
Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level	3	3	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD terealisasi sebesar 100**%**. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target Nasional
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level	3	3	100	3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas

penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Capaian %
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level	3	3	3	100

Berdasarkan perbandingan kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD dengan standar Nasional dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 (level 3 atau 100%) sama dengan standar nasional yaitu level 3 sehingga dapat dikatakan bahwa Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Untuk mencapai peningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD adalah dengan progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun data capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Level 3) diketahui sama dengan capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Level 3).

Tabel 3.18
Data Anggaran Sasaran Strategis Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**116.222.400**	**85.168.200**	**31.054.200**	**73.28**	**26.72**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**116.222.400**	**85.168.200**	**31.054.200**	**73.28**	**26.72**
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.647.400	59.593.200	31.054.200	65.74	34.26
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	-	100.00	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	-	100.00	-
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.375.000	7.375.000	-	100.00	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	-	100.00	-

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.85.168.200,- atau 73,28% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.116.222.400,- dengan capaian output kinerja sebesar 100.00%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Level Maturitas SPIP terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

   kompetensi SDM belum memadai, kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan komunikasi

B. Faktor Pendukung

   Komitmen Pimpinan yang tinggi dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta ketersediaan potensi yang menunjang

C. Rencana Aksi

   Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP di BPKD

2. Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competency*-nya. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokusnya diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD. Kualitas Pelaporan Keuangan merupakan indikator yang dihitung mulai dari Tahap Perencanaan Program, Kegiatan Subkegiatan, Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan maupun Pertanggungjawaban.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	Angka	780	826	105,90

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai angka 780 dan dapat direalisasikan sebesar 826 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 105,90% melebihi target yang teelah ditetapkan.

Adapun Rincian Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Rincian Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023

No	PENILAIAN	HASIL
1	**PENILAIAN DOKUMEN PERENCANAAN**	**400**
	Nilai Nomenklatur Program Renstra Dan Renja	100
	Nilai Nomenklatur Program Renja Dan RKA Serta DPA	100
	Nilai Pagu Penetapan Kinerja terhadap Renja Dan RKA	100
	Ketepatan Waktu Penetapan Dan Publikasi Pada Website	100
2	**PENILAIAN DOKUMEN ANGGARAN (DPA)**	**92**
	koordinasi dgn TAPD	18
	kesesuaian penyusunan RKA/DPA (RKPD KUA PPAS)	19
	ketaatan pelaksanaan dan tindaklanjut asistensi	18
	ketepatan penyampaian RKA/DPA	18
	Temuan BPK RI	19
3	**REKONSILIASI ASET**	**99**
	Kelengkapan Data pendukung rekonsiliasi (Berita Acara Rekonsiliasi Aset, Neraca Aset, Rekapitulasi Aset Tetap dan KIB)	35
	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan	35
	Ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi (sesuai dengan judul rekon yang telah ditetapkan	29
4	**REKONSILIASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD**	**90**
	Kelengkapan Dokumen (Berita Acara Rekonsiliasi dan Data Pendukung Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD)	30
	Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan	30
	Ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi (sesuai dengan judul rekon yang telah ditetapkan)	30
5	**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**	**99**
	Kelengkapan Dokumen (LRA, LO, LPE, NERACA dan CALK)	35
	Kesesuaian Sistematika Pelaporan	30
	Sinkronisasi data laporan (presentasi realisasi terhadap target pendapatan, presentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja)	34
6	**JUMLAH NILAI LKIP**	**70**
	JUMLAH	**826**

Tabel 3.21
Data Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	angka	770	813.56	105.66	775	803.46	103.67	780	826	105.90

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indikator Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD pada tahun 2023 (105,90%) mengalami kenaikan realisasi sebesar 2,81% dibandingkan dengan tahun 2022 (103,67%) dan kenaikan sebesar 1,53% dibandingkan realisasi tahun 2021 (105,66%).

Tabel 3.22
Perbandingan Data Capaian Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	Nilai	750	826	110,13

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD sebesar 110,13%. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam upaya peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan di Tiap SKPD dan Desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan Penilaian Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar LKPD yang dihasilkan dari Laporan Keuangan tiap SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berpengaruh terhadap penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan setiap tahun. Terdapat empat opini yang diberikan

yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Untuk WTP sendiri ada yg WTP dan WTP Dengan Paragraf Penekanan Suatu hal (DPP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu tolok ukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.

Berikut Opini Hasil Pemeriksaan LKPD di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2022.

Tabel 3.23
Rekap Opini hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK-RI
di Jawa Barat Tahun 2022

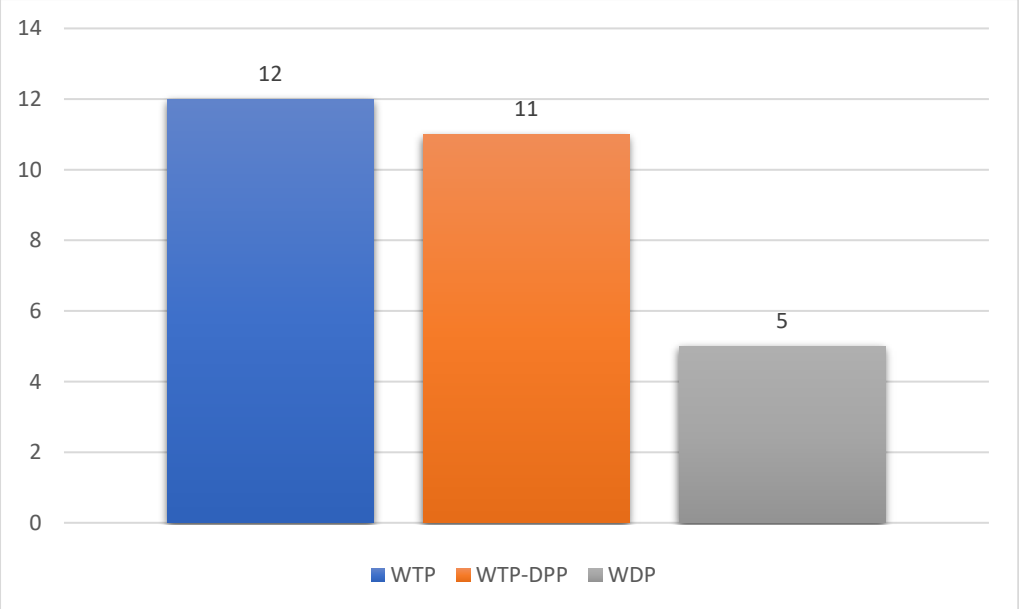

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Tabel 3.24
Data Anggaran Sasaran Strategis Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.440.567.961**	**9.519.147.290**	**921.420.671**	**91.17**	**8.83**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.440.567.961**	**9.519.147.290**	**921.420.671**	**91.17**	8.83
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.858.067.961	8.962.081.350	895.986.611	90.91	9.09
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.000.000	199.130.600	10.869.400	94.82	5.18
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.625.000	23.625.000	-	100.00	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.330.000	15.000.000	330.000	97.85	2.15
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.545.000	13,140,000	405.000	97.01	2.99
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	306.170.340	13.829.660	95.68	4.32

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.9.519.147.290,- atau 91,17% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.10.440.567.961,- dengan capaian output kinerja sebesar 105,90%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat
   - Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dapat dilihat Data hasil temuan pemeriksaan BPK RI Tahun 2022, ada 8 Temuan dari 56 SKPD di Kabupaten Ciamis.

- Ketidaktepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah, hal ini diakarenakan ada beberapa SKPD yang rentang kendalinya jauh dan asetnya banyak, yaitu sebanyak 4 SKPD. Berdasarkan data tahun 2022 dari 56 SKPD yang menyampaikan laporan Barang Milik Daerah, sebanyak 43 SKPD yang tepat waktu sedangkan sisanya 8 SKPD yang kurang/tidak tepat waktu.

B. Faktor Pendukung

Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi pendukung serta dukungan Pimpinan.

C. Rencana Aksi

- Peningkatan pemahaman SDM pengelola kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sosialisasi dan pendampingan.
- Optimalisasi kegiatan koordinasi, rekonsiliasi secara terus menerus baik dari Kepala SKPD, pengurus barang sampai operator tiap SKPD agar penyusunan laporan Barang Milik Daerah bisa tepat waktu

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competency*-nya. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokusnya diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke-5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 2 indikator yaitu

a. Ketepatan waktu penetapan APBD, dan
b. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Ketepatan Waktu Penetapan APBD merupakan indikator yang dihitung berdasarkan prinsip penyusunan APBD yaitu tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Tepat Waktu Penetapan APBD adalah dengan progam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sasaran dari progam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Capaian kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD selama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persentase	100	100	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 100% dan dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.26
Data Capaian Kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Ketepatan Waktu Penetapan APBD pada tahun 2023 (100%), sama dibandingkan dengan tahun 2022 (100%) dan sama dibandingkan realisasi tahun 2021 (100%).

Tabel 3.27
Perbandingan Data Capaian Kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan	Persentase	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD masuk dalam Tagret Indikator Kinerja Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan dengan realisasi sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan masih sesuai dengan rencana.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD Dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Capaian %
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD (Prop.Jabar)	Persen	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun data capaian kinerja Tepat Waktu Penyampaian APBD (100%) diketahui sama dengan capaian Tepat Waktu Penyampaian APBD Provinsi Jawa Barat (100%).

Tabel 3.29
Data Anggaran Sasaran Strategis
Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian APBD

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**2.210.068.500**	**2.060.617.800**	**149.450.700**	**93.24**	**6.76**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**1.234.564.000**	**1.178.280.300**	**56.283.700**	**95.44**	4.56
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	150.000.000	146.150.000	3.850.000	97.43	2.57
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	272.074.000	271.883.000	191.000	99.93	0.07
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	255.490.000	255.490.000	-	100.00	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	107.000.000	102.757.300	4.242.700	96.03	3.97
	- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	200.000.000	152.000.000	48.000.000	76.00	24.00
	- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-	100.00	-
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**975.504.500**	**882.337.500**	**93.167.000**	**90.45**	**9.55**
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91.080.900	89.132.700	1.948.200	97.86	2.14
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	135.480.000	109.432.082	26.047.918	80.77	19.23
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	128.080.500	125.731.200	2.349.300	98.17	1.83

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	126.488.100	125.072.284	1.415.816	98.88	1.12
	- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	494.375.000	432.969.234	61.405.766	87.58	12.42

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.2.060.617.800,- atau 93,24% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.2.210.068.500,- dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian APBD, terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan indikator Ketepatan Waktu Penyampaian APBD di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat
   1. Pengajuan usulan komponen standar harga dari SKPD yang selalu terlambat, usulan baru diajukan setelah peraturan bupati tentang standar harga diterbitkan.
   2. Keterlambatan pedoman untuk menyusun regulasi dan peraturan terkait Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.

B. Faktor Pendukung

   Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi pendukung serta dukungan Pimpinan.

C. Rencana Aksi
   1. Mengefektifkan fungsi *Person in charge* (PIC) atau penanggungjawab pekerjaan tiap SKPD agar inputan RKA dapat diselesaikan tepat pada waktunya

2. Terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak penyusun kebijakan agar dapat mengambil langkah antisipasi yang efektif.

b. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu

Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu, adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang diungkapkan secara wajar sesuai Peraturan Perundang-undangan salah satunya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII Poin B ayat 1 bahwa Penyerahan LKPD Tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu adalah progam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sasaran dari progam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Ciamis

Capaian kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Persentase	100	100	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 100% dan dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.31
Data Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu pada tahun 2023 (100%), sama dibandingkan dengan tahun 2022 (100%) dan sama dibandingkan realisasi tahun 2021 (100%).

Tabel 3.32
Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan dan Tepat waktu	Persentase	100	100	100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase laporan keuangan daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu masuk dalam tagret indikator kinerja persentase dokumen keuangan daerah yang penyusunannya sesuai dengan

peraturan dengan realisasi sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan masih sesuai dengan rencana.

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Tepat Waktu Penyampaian LKPD dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Capaian %
1	Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai Target Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu adalah dengan progam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Adapun data capaian kinerja Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu (100%) diketahui sama dengan capaian Laporan Keuangan Daerah tepat waktu Provinsi Jawa Barat (100%).

Tabel 3.34
Data Anggaran Sasaran Strategis
kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**537.119.048.422**	**512.542.793.004**	**24.576.255.418**	**95.42**	4.58
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**1.467.377.000**	**1.390.172.251**	**77.204.749**	**94.74**	5.26
	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	130.320.000	125.890.500	4.429.500	96.60	3.40
	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	174.250.000	161.051.000	13.199.000	92.43	7.57

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
	- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	508.135.000	500.384.750	7.750.250	98.47	1.53
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	321.240.000	279.404.501	41.835.499	86.98	13.02
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	107.700.000	107.365.000	335.000	99.69	0.31
	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	225.732.000	216.076.500	9.655.500	95.72	4.28
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**535.651.671.422**	**511.152.620.753**	**24.498.754.671**	**95.43**	4.57
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	15.010.000.000	14.499.592.548	510.407.452	96.60	3.40
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	506.712.371.023	490.471.664.805	16.240.706,218	96.79	3.21
	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.850.000.000	1.192.179.000	3.657.821.000	24.58	75.42
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.079.300.399	4.989.184.400	4.090.115.999	54.95	45.05

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.512.543.089.002,- atau 95,42% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.537.119.048.422,- dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja kinerja Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan

Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat
   1. Dalam penggunaan aplikasi SIPD masih banyak kendala misalnya apabila terjadi kesalahan input data atau rekening yang tidak sesuai harus menunggu perbaikan dari pusat dalam jangka waktu yang lama.
   2. Masih banyak SDM pengelola keuangan daerah yang belum memahami akuntansi sektor publik dikarenakan pergantian SDM pada jabatan operator, bendahara pengeluaran, kasubag keuangan/analis keuangan pusat dan daerah di masing-masing SKPD
   3. Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah di Sebagian besar SKPD dengan *basic* kompetensi ilmu akuntansi.

B. Faktor Pendukung

   Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi pendukung serta dukungan Pimpinan.

C. Rencana Aksi
   1. Penggunaan aplikasi SIPD akuntansi dan pelaporan lebih dioptimalkan.
   2. Melaksanakan pembinaan kepada operator, bendahara pengeluaran, kasubag keuangan/analis keuangan pusat dan daerah SKPD.
   3. Merekrut pengelola keuangan dari basic keilmuan akuntansi untuk ditempatkan di beberapa SKPD.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

perangkat daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan *core competency*-nya. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokusnya diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Aset Daerah Yang Terkelola.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah diukur dari indikator Persentase Aset Daerah Yang Terkelola yang terdiri dari sub indikator Persentas Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik, Pengamanan Aset (Sertipikat Tanah Pemda), Pengawasan dan Pengendalian (Sewa Tanah dan Bangunan) dan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan target dan realisasi Capaian kinerja Presentase Aset Daerah yang terkelola selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	Persen	100	114,26	114,26
	- % Kesesuaian Pengadaan Barang Milik Daerah dengan RKBMD	Persen	100	100	100
	- % Kondisi Aset Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100	92,23	92,23

	- % Pengamanan Aset (Sertifikat)	Persen	100	174,00	174,00
	- % Pengawasan dan Pengendalian (Sewa BMD)	Persen	100	123,57	123,57
	- Penyelesaian Kerugian Daerah	Persen	100	81,49	81,49

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 100 Persen dan dapat direalisasikan sebesar 114,26 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 114,26% melebihi target yang tlah ditetapkan.

Tabel 3.36
Data Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola
Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	Persen	100	100,87	100.87	100	108,92	108,92	100	114,26	114,26

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indikator Kinerja Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD pada tahun 2023 (114,26%) mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,34% dibandingkan dengan tahun 2022 (108,92%) dan kenaikan sebesar 13,39% dibandingkan realisasi tahun 2021 (100,87%).

Tabel 3.37
Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Aset Daerah Yang Terkelola Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	Persen	100	114,26	114,26

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian Kinerja Persentase Aset

Daerah Yang Terkelola sebesar 114,26%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel 3.38
Data Anggaran Sasaran Strategis
Persentase Aset Daerah Yang Terkelola

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Efisiensi
				=3-4	=(4/3)x100	=(5/3)x100
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**16.200.574.496**	**10.734.859.269**	**5.465.715.227**	**66.26**	33.74
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**16.200.574.496**	**10.734.859.269**	**5.465.715.227**	**66.26**	33.74
	- Penyusunan Standar Harga	193.000.000	189.296.300	3.703.700	98.08	1.92
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.763.478.496	7.450.203.020	5.313.275.476	58.37	41.63
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	440.324.100	426.897.800	13.426.300	96.95	3.05
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	1.184.356.900	1.125.996.649	58.360.251	95.07	4.93
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	201.385.000	196.585.000	4.800.000	97.62	2.38
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	432.350.000	363.443.500	68.906.500	84.06	15.94
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	985.680.000	982.437.000	3.243.000	99.67	0.33

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp.10.734.859.269,- atau 66,26% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp.16.200.574.496,- dengan capaian output kinerja sebesar 100,00%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Presentase aset daerah yang terkelola terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah dengan indikator Kinerja

Persentase Aset Daerah yang terkelola Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat
   1. Dalam kegiatan Pengamanan Milik Daerah, SKPD belum memahami sepenuhnya tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna barang sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
   2. Para penyewa tanah/bangunan belum memahami kewajibannya sesuai regulasi yang ada di Kabupaten Ciamis yaitu Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.

B. Faktor Pendukung

   Setelah melaksanakan Sosialiasi/Bimtek SDM lebih terampil, Ketersediaan potensi yang menunjang seperti sarana dan prasarana, Aplikasi pendukung serta dukungan Pimpinan.

C. Rencana Aksi
   1. Melaksanakan sosialisasi Permendagri 19 Tahun 2016 serta memberikan pemahaman secara persuasif dan terus menerus.
   2. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah serta memberikan pemahaman secara persuasif dan terus menerus.

B. Akuntabilitas Keuangan

Data Realisasi anggaran pada BPKD Kabupaten Ciamis yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.39
Data Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian %
	Urusan Keuangan	**571.634.925.379**	**540.405.104.501**	**31.229.820.878**	**94.54**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.105.233.961**	**15.066.834.428**	**1.038.399.533**	**93.55**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**152.842.400**	**120.718.200**	**32.124.200**	**78.98**
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	-	100.00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.620.000	28.550.000	1.070.000	96.39
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.647.400	59.593.200	31.054.200	65.74
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	-	100.00
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.600.000	5.600.000	-	100.00
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.375.000	7.375.000	-	100.00
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	7.000.000	-	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.440.567.961**	**9.519.147.290**	**921.420.671**	**91.17**
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.858.067.961	8.962.081.350	895.986.611	90.91
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.000.000	199.130.600	10.869.400	94.82
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.625.000	23.625.000	-	100.00
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.330.000	15.000.000	330.000	97.85
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.545.000	13.140.000	405.000	97.01
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	306.170.340	13.829.660	95.68
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**385.808.250**	**384.232.750**	**1.575.500**	**99.59**
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.250.500	30.250.000	500	100.00
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	355.557.750	353.982.750	1.575.000	99.56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**728.564.100**	**716.348.328**	**12.215.772**	**98.32**

	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian %
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.088.600	89.087.885	715	100.00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265.346.500	265.344.943	1.557	100.00
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.845.000	94.767.500	77.500	99.92
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138.198.000	128.755.000	9.443.000	93.17
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141.086.000	138.393.000	2.693.000	98.09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**616.205.750**	**598.658.845**	**17.546.905**	**97.15**
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.300.000	23.300.000	-	100.00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.555.000	111,688,845	8.866.155	92.65
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.350.750	463.670.000	8.680.750	98.16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera.	**2.495.541.500**	**2.469.684.536**	**25.856.964**	**98.96**
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.511.500	366.654.536	25.856.964	93.41
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.103.030.000	2.103.030.000	-	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.285.704.000**	**1.258.044.479**	**27.659.521**	**97.85**
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.000.000	368.420.279	4.579.721	98.77
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	12.167.700	16.332.300	42.69
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480.450.000	474.293.500	6.156.500	98.72
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403.754.000	403.163.000	591.000	99.85
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**539.329.116.922**	**514.603.410.804**	**24.725.706.118**	**95.42**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**1.234.564.000**	**1.178.280.300**	**56.283.700**	**95.44**
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	150.000.000	146.150.000	3.850.000	97.43

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian %
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	272.074.000	271.883.000	191.000	99.93
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	255.490.000	255.490.000	-	100.00
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	107.000.000	102.757.300	4.242.700	96.03
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	200.000.000	152.000.000	48.000.000	76.00
- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-	100.00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**975.504.500**	**882.337.500**	**93.167.000**	**90.45**
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91.080.900	89.132.700	1.948.200	97.86
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	135.480.000	109.432.082	26.047.918	80.77
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	128.080.500	125.731.200	2.349.300	98.17
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	126.488.100	125.072.284	1.415.816	98.88
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	494.375.000	432.969.234	61.405.766	87.58
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**1.467.377.000**	**1.390.172.251**	**77.204.749**	**94.74**
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	130.320.000	125.890.500	4.429.500	96.60
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	174.250.000	161.051.000	13.199.000	92.43
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	508.135.000	500.384.750	7.750.250	98.47

	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian %
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	321.240.000	279.404.501	41.835.499	86.98
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	107.700.000	107.365.000	335.000	99.69
	- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	225.732.000	216.076.500	9.655.500	95.72
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**535.651.671.422**	**511.152.620.753**	**24.499.050.669**	**95.43**
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	15.010.000.000	14.499.592.548	510.407.452	96.60
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	506.712.371.023	490.471.664.805	16.240.706.218	96.79
	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.850.000.000	1.192.179.000	3.657.821.000	24.58
	- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.079.300.399	4.989.184.400	4.090.115.999	54.95
3	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**16.200.574.496**	**10.734.859.269**	**5.465.715.227**	**66.26**
	- Penyusunan Standar Harga	193.000.000	189.296.300	3.703.700	98.08
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.763.478.496	7.450.203.020	5.313.275.476	58.37
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	440.324.100	426.897.800	13.426.300	96.95
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	1.184.356.900	1.125.996.649	58.360.251	95.07
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	201.385.000	196.585.000	4.800.000	97.62
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	432.350.000	363.443.500	68.906.500	84.06
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	985.680.000	982.437.000	3.243.000	99.67

Tahun 2023, BPKD Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar Rp.571.634.925.379,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.540.405.104.501,- Dengan demikian kinerja keuangan tercapai

sebesar 94,54%. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 5,46% atau Rp31.229.820.878,-

C. Prestasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut adalah daftar prestasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2023:

Tabel 3.40
Daftar Prestasi Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Nama Penerima	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan	Perangkat Daerah Leading Sektor
1	JUARA 1 TINGKAT NASIONAL : OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 10 KALI BERTURUT-TURUT	PEMKAB. CIAMIS	BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN PROV. JAWA BARAT	2023	BPKD, SEMUA OPD DI KAB.CIAMIS
2	JUARA 1 TINGKAT NASIONAL : OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN ANGGARAN 2022	PEMKAB. CIAMIS	BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN PROV. JAWA BARAT	2023	BPKD, SEMUA OPD DI KAB.CIAMIS
3	JUARA 1 PEMDA DENGAN KINERJA PENYALURAN DAK FISIK TERBAIK PERTAMA TA. 2023	PEMKAB. CIAMIS	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	2023	BPKD, DISDIK, PERPUSTAKAAN, DINKES, KB, DPUPRP, DPRKPLH, PERTANIAN, DISNAKAN
4	JUARA 2 PEMDA DENGAN KINERJA PELAKSANAAN DANA DESA TA. 2023	PEMKAB. CIAMIS	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	2023	BPKD, DPMD

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKD Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Pada tahun 2023 BPKD Kabupaten Ciamis berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 102,94%. Sebanyak 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Selain itu BPKD Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.571.634.925.379,- realisasi sebesar Rp.540.405.400.499,- atau 94,54% dengan total efisiensi sebesar 5,46% atau senilai Rp.31.229.524.880,-

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPKD terus berupaya mendukung pemerintah melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Ciamis, Februari 2024

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

ASEP DEDI HERDIANA, SE

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja;
2. Indikator Kinerja Utama.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Eselon II

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Jln. Drs. H. Soejoed No. 05A Telp. (0265) 771032 Fax. (0265) 773570 CIAMIS 46213

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP DEDI HERDIANA., SE
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Jabatan : Bupati Ciamis
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, November 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Pihak Pertama,

ASEP DEDI HERDIANA., SE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD 2. Hasil Evaluasi AKIP BPKD 3. Level Maturitas SPIP BPKD	89,25 BB 3
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD	780
3. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu 2. Ketepatan waktu penetapan APBD	100% 100%
4. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%

Program		Anggaran
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	16,105,233,961
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	535,651,671,422
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	16,200,574,496
Jumlah	**Rp.**	**571,634,925,379**

Ciamis, November 2023

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

ASEP DEDI HERDIANA, SE

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	89,25	1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16,105,233,961**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**728,564,100**
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89,088,600
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265,346,500
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,845,000
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	138,198,000
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	141,086,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2,495,541,500**
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392,511,500
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,103,030,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**616,205,750**
			- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23,300,000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,555,000
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472,350,750
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1,285,704,000**
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373,000,000
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28,500,000
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480,450,000
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	403,754,000
	2. Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD	BB	2. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**422,428,250**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**36,620,000**
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,000,000
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,620,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**385,808,250**
			- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30,250,500
			- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	355,557,750

	3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP BPKD	Level 3	**3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**116,222,400**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**116,222,400**
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,647,400
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,600,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,600,000
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,375,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,000,000
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	**Kualitas Pelaporan Keuangan BPKD**	**780**	**4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10,440,567,961**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10,440,567,961**
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,858,067,961
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210,000,000
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23,625,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,330,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,545,000
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,000,000
3. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	**1. Ketepatan waktu penetapan APBD**	**100%**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**539,479,116,922**
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**1,234,564,000**
			- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	150,000,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	272,074,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	255,490,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	107,000,000
			- Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	200,000,000
			- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250,000,000
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**975,504,500**
			- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91,080,900
			- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	135,480,000
			- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	128,080,500
			- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	126,488,100
			- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	494,375,000
	2. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	**100%**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan**	**1,467,377,000**
			- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	130,320,000
			- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	174,250,000

			- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	508,135,000
			- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	321,240,000
			- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	107,700,000
			- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	225,732,000
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**535,801,671,422**
			- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	15,010,000,000
			- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	506,712,371,023
			- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,850,000,000
			- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,079,300,399
4. Meningkatkan Pengelolaaân Aset Daerah	**Persentase Aset Daerah Yang Terkelola**	**100%**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**16,200,574,496**
			- Penyusunan Standar Harga	193,000,000
			- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12,763,478,496
			- Penatausahaan Barang Milik Daerah	440,324,100
			- Pengamanan Barang Milik Daerah	1,184,356,900
			- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	201,385,000
			- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	432,350,000
			- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	985,680,000

	Program		Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	16,105,233,961
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	535,651,671,422
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	16,200,574,496
	Jumlah		**571,634,925,379**

Ciamis, November 2023

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

ASEP DEDI HERDIANA, SE